

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI

Fikri Qusyaeri¹, Diani Indah², Ade Sudrajat³

Email : Fikriqusyaeri07@gmail.com¹, indahdiani716@gmail.com², sudrajatade099@gmail.com³

¹Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

^{2,3}Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. SIPD sebagai sistem terpadu yang diamanatkan melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah secara elektronik, terintegrasi, serta berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumentasi terkait proses pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Analisis penelitian merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III, yang terdiri atas variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKPD Kota Sukabumi belum berjalan optimal. Secara umum, sistem telah digunakan dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran, namun efektivitasnya belum maksimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, belum memadainya fasilitas pendukung, serta gangguan jaringan dan server pusat yang sering terjadi sehingga memperlambat proses input data. Selain itu, belum tersedia regulasi daerah yang secara khusus mengatur penggunaan SIPD sehingga pelaksana lebih bergantung pada kebijakan pusat.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi operator, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta mendorong penyusunan SOP internal terkait penggunaan SIPD. Penelitian merekomendasikan perlunya dukungan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih efektif dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Implementasi, Evaluasi, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kebijakan Publik, Keuangan Daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Sukabumi City Regional Finance and Revenue Management Agency (BPKPD), and to identify obstacles and efforts made in its implementation. SIPD, as an integrated system mandated by Home Affairs Ministerial Regulation No. 70 of 2019, is the primary instrument for local government in managing regional planning and finance electronically, integrated, and oriented towards transparency and accountability.

The study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation review related to the regional financial management process through SIPD. The research analysis refers to the policy implementation theory proposed by Edwards III, which comprises the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results indicate that SIPD implementation at the Sukabumi City BPKPD has not been optimal. In general, the system has been used to support the planning and budgeting process, but its effectiveness has not been maximized. Several obstacles identified include limited human resource competency in operating the application, inadequate supporting facilities, and frequent network and central server disruptions, which slow down the data input process. Furthermore, there are no regional regulations specifically governing the use of SIPD, leaving implementers more dependent on central government policies.

Efforts undertaken by regional governments include increasing training and technical guidance for operators, strengthening coordination between regional government agencies (OPDs), and encouraging the development of internal standard operating procedures (SOPs) related to SIPD use. The study recommends the need for regional policy support, increased human resource capacity, and strengthened infrastructure to ensure more effective SIPD implementation and support transparent and accountable governance.

Keywords: *Implementation, Evaluation, Regional Government Information System, Public Policy, Regional Finance.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi agenda strategis nasional seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu implementasinya di tingkat daerah adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mencakup perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaporan, hingga manajemen data pemerintahan daerah secara elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penyediaan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, SIPD diharapkan menjadi instrumen utama dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran berbasis data. Sistem ini menggantikan berbagai aplikasi sebelumnya yang dinilai tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan integrasi data antar-OPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi merupakan salah satu perangkat daerah yang wajib mengimplementasikan SIPD dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam praktiknya, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala baik secara teknis maupun non-teknis.

Masalah yang paling dominan adalah masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, tidak stabilnya jaringan dan server pusat yang sering mengalami gangguan, serta ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur

mekanisme operasional SIPD. Selain itu, proses penginputan data yang memerlukan ketelitian tinggi seringkali terhambat karena kapasitas sistem yang belum optimal dalam menampung akses serentak dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan efektivitas SIPD dalam menunjang proses perencanaan dan penganggaran daerah belum sepenuhnya tercapai.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SIPD di berbagai daerah masih menghadapi persoalan serupa, terutama terkait kesiapan infrastruktur, kompetensi operator, serta koordinasi antar-OPD. Namun, penelitian khusus mengenai implementasi SIPD dalam lingkup pengelolaan keuangan di Kota Sukabumi masih terbatas. Oleh karena itu, studi ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan implementasi SIPD dijalankan oleh BPKPD Kota Sukabumi, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan berbasis sistem informasi dalam birokrasi pemerintah daerah.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan di bidang tata kelola keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penerapan SIPD demi mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumentasi terkait proses pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Analisis penelitian merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III, yang terdiri atas variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Komunikasi dalam Implementasi SIPD

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi vertikal maupun horizontal terkait implementasi SIPD di BPKPD Kota Sukabumi belum berjalan optimal. Informasi dari pemerintah pusat mengenai perubahan fitur, pembaruan sistem, dan pedoman teknis sering kali disampaikan mendadak sehingga menyulitkan OPD dalam menyesuaikan proses kerja. Sosialisasi internal antar-bidang di BPKPD telah dilakukan, namun belum merata dan belum menjangkau semua operator secara komprehensif. Akibatnya, interpretasi kebijakan SIPD di tingkat pelaksana masih berbeda-beda sehingga memengaruhi konsistensi pelaksanaan.

Sumber Daya

Hambatan paling signifikan dalam implementasi SIPD adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak operator belum menguasai secara penuh menu dan fitur dalam SIPD, terutama pada modul perencanaan dan penganggaran yang bersifat teknis dan detail. Tingginya ketergantungan pada beberapa operator yang dianggap “paling paham” menyebabkan beban kerja tidak seimbang. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti jaringan internet, server pusat, dan perangkat komputer belum sepenuhnya memadai. Gangguan server nasional sering terjadi pada masa unggah data,

menyebabkan keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan.

Disposisi Pelaksana

Secara umum, pelaksana di BPKPD memiliki komitmen terhadap penggunaan SIPD, namun tingkat penerimaan terhadap sistem baru ini masih bervariasi. Beberapa pegawai merasa keberadaan SIPD memperumit pekerjaan karena proses input lebih rinci dibanding aplikasi sebelumnya. Selain itu, perubahan kebijakan dari pusat yang terjadi secara cepat membuat pelaksana merasa tidak memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Namun demikian, terdapat motivasi kuat untuk belajar melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan diskusi internal antaroperator.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dinilai belum sepenuhnya mendukung optimalisasi SIPD. Belum adanya regulasi daerah seperti Peraturan Wali Kota atau SOP khusus penggunaan SIPD membuat mekanisme kerja lebih mengandalkan instruksi informal dan pengalaman operator. Alur koordinasi antar-OPD juga belum stabil, terutama dalam penyelarasan data perencanaan dan penganggaran. Standar prosedur dalam penginputan data SIPD masih berubah mengikuti kebijakan pusat, sehingga memengaruhi ritme kerja pelaksana.

PEMBAHASAN

Komunikasi yang Belum Efektif Menurunkan Kualitas Implementasi

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan yang tidak konsisten berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi. Menurut Edwards III, komunikasi yang jelas dan konsisten merupakan elemen utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks BPKPD Kota Sukabumi, informasi teknis yang

terlambat atau berubah mendadak menyebabkan terjadinya miskomunikasi antaroperator dan keterlambatan input data. Kondisi ini sejalan dengan penelitian serupa di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Keterbatasan SDM dan Infrastruktur Sebagai Faktor Penghambat Utama

Sumber daya manusia merupakan variabel krusial dalam penerapan sistem informasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa belum meratanya kompetensi operator menjadi salah satu hambatan terbesar. Edwards III menekankan pentingnya ketersediaan SDM kompeten dalam menunjang implementasi kebijakan berbasis teknologi. Di sisi lain, gangguan jaringan dan server SIPD menjadi hambatan teknis yang memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Masalah ini juga ditemukan di sejumlah penelitian lain yang mengkaji implementasi SIPD di kabupaten/kota lain, sehingga menjadi isu nasional yang memerlukan evaluasi pada level kebijakan.

Disposisi Pelaksana Memengaruhi Tingkat Penerimaan Sistem

Disposisi pelaksana, seperti komitmen, pemahaman, dan sikap terhadap kebijakan, berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen pelaksana untuk menjalankan SIPD, persepsi bahwa sistem ini rumit dan sering bermasalah mengurangi motivasi sebagian pegawai. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan teknologi harus disertai dengan proses pendampingan, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan budaya organisasi berbasis digital agar pelaksana lebih adaptif terhadap sistem baru.

Struktur Birokrasi Tanpa SOP Menyebabkan Kurangnya Kepastian Prosedural

Ketiadaan SOP operasional menyebabkan implementasi SIPD berjalan tanpa standar yang jelas. Sementara itu, Edwards III menekankan bahwa struktur birokrasi yang baik harus memiliki pedoman prosedural yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Ketergantungan pada arahan pusat serta belum adanya regulasi daerah menyebabkan pelaksana bekerja dengan pola coba-coba (trial and error). Hal ini berdampak pada ketidakseragaman input data antar-OPD serta tingginya risiko kesalahan administratif.

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi menunjukkan bahwa pengimplementasian aplikasi tersebut dilihat dari empat faktor, komunikasi mampu berkoordinasi dengan pejabat pelaksana kegiatan dalam penerapan aplikasi tersebut dengan semua SKPD di Kota Sukabumi dan memastikan komunikasi berjalan dengan baik dan mudah dimengerti. Sumberdaya manusia yang rendah yang menjadi hambatan dalam implementasi aplikasi tersebut, karena masih adanya pejabat pelaksana yang kurangnya pengetahuan dan pemahaman hingga kedalaman aplikasi. Disposisi sikap pelaksana menunjukkan bahwa masih banyaknya pegawai resistensi terhadap perubahan beberapa pejabat pelaksana mungkin merasa kesulitan untuk beralih dari sistem manual ke penggunaan aplikasi SIPD yang lebih modern dan berbasis teknologi dan terkadang seorang pejabat yang hanya melihat aplikasi SIPD sebagai tambahan tugas administratif tanpa memahami

bagaimana aplikasi tersebut dapat mempercepat proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Pada indikator struktur berjalan cukup baik karena pegawai paham akan tupoksinya masing-masing, karena struktur birokrasi mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi tersebut, birokrasi yang tersusun dengan baik mempermudah alur pengambilan keputusan, verifikasi data, dan penyampaian laporan, serta mempercepat proses administrasi terkait anggaran keuangan daerah dan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hambatan-hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi antara lainnya yang diperoleh adalah faktor dari sumberdaya manusia dan disposisi sikap pelaksana sebagai indikator yang menyebabkan rendahnya keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi menunjukkan yaitu dengan adanya peraturan yang tertuang dalam intruksi PERPRES No.39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dipertegas oleh peraturan menteri dalam negeri tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 25 September 2019.

SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah kota sukabumi dan seluruh pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Sukabumi untuk para pejabatnya terlibat dalam hal ini agar tetap saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan dari pada implementasi kebijakan ini.
2. Kepada pihak yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ini harus diadakannya sosialisasi/bintek secara berkala demi mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik efektif, efisien dan transparan.
3. Pemerintah Kota Sukabumi perlu memberikan edukasi kepada pejabat pelaksana di masing-masing SKPD untuk lebih kooperatif dan tanggung jawab atas penerapan aplikasi tersebut demi mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik.
4. Kepada seluruh pejabat pelaksana maupun staff/operator agar sekiranya memahami dan dipelajari lebih dalam mengenai akan pentingnya aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, S. (2017). *Analisis kebijakan publik: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Djemabut, C. B. (1986). *Perumahan dan pemukiman sebagai kebutuhan pokok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realita*. Gorontalo: UNG Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. D. (2024). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ridwan, H. R. (2003). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabarguna, B. (2005). *Analisis data pada penelitian kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan publik: Teori dan proses* (Edisi revisi). Yogyakarta: Media Pressindo.

Mcleod, R., Jr., & Schell, G. P. (2008). *Sistem informasi manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Media Birokrasi*, 5(2), 155–169.

Jurnal

Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.

Inzany, R. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(10), 3573–3588.

Karundeng, A. B., dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1(2).

Nasution, M. I., & Nurwani, M. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109–116.

Nurwani, I. N. M. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada BPKAD Kota Medan. *Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109–116.

Tumija, P. A. E. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran

Tesis & Artikel Penelitian

Ilmi, M. D. H. (2022). *Strategi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi kasus BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara)* (Tesis). Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Makassar.

Wahyuni, S. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA Kabupaten Enrekang* (Tesis). Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Makassar.